

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Dalam konteks kehidupan sehari-hari penggunaan istilah “*gratis*” sering diperdebatkan di kalangan masyarakat. Karena dalam penggunaan istilah gratis tersebut, maka tersirat sebuah arti bahwa keseluruhan biaya pendidikan akan menjadi tanggungan dari pemerintah seperti yang dijelaskan dalam UU di atas. Dan seluruh komponen masyarakat yang menikmati pendidikan tersebut dibebaskan dari seluruh pembebanan biaya pendidikan tersebut. Menelaah lebih lanjut tentang pendidikan gratis, dalam hemat penulis pendidikan pada hakekatnya adalah hak publik atau masyarakat, sebagaimana yang dituangkan dalam UU yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan.

Pengertian pendidikan gratis sebenarnya secara implisit telah tertuang dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di mana UU ini telah mengamanatkan masyarakat yang tidak mampu digratiskan atau tidak dikenakan pungutan biaya sampai mencapai usia wajib belajar 9 tahun. Masih menurut UU tersebut pada pasal 10 disebutkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian pendidikan yang menurut UU Sisdiknas tersebut tersirat sebuah makna tanggung jawab pemerintah terhadap jalannya proses pendidikan baik dalam pembiayaan maupun pembimbingan terhadap masyarakat yang kurang

mampu. Sebagai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka pendidikan adalah salah satu instrument utama dalam penciptaan sumber daya manusia yang produktif. Sekarang ini sudah banyak Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan Pendidikan Gratis, baik tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk membina kepribadian dalam kehidupan masyarakat maupun lingkungannya. Dalam hemat saya pendidikan juga merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku masyarakat melalui, pembinaan dan pengajaran. Pendidikan sangatlah penting untuk perbaikan kepribadian dan budi pekerti bagi setiap manusia, karena pendidikan memiliki peran yang hakiki dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi aktor-aktor yang nantinya akan menjalankan fungsi dari berbagai bidang kehidupan yang bersangkutan, terutama dalam proyek perbaikan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pendidikan gratis merupakan pendidikan tanpa biaya, karena telah diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa sekitar 20% dari APBD dan APBN diprioritaskan untuk kelangsungan proses pendidikan. Pendidikan gratis ini merupakan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang saat ini sudah diterapkan. Sesuai dengan kebijakan pendidikan Nasional UU No. 20 tahun 2003 pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara. Dapat dipertegas bahwa pendidikan gratis mengandung arti bahwa siswa

bisa bersekolah tanpa kewajiban orang tua membayar apapun. Kewajiban untuk membayar menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah yang membayar uang sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, serta menyediakan kebutuhan lain yang terkait dengan sekolah¹.

Pendidikan juga merupakan modal utama untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jika kita analisis tentang anjuran pemerintah yang dituangkan pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 6 ayat 1 bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Ini menandakan bahwa kewajiban untuk mengenyam pendidikan sangat esensial bagi terciptanya sumber daya manusia yang produktif.

Manusia yang berkualitas dibutuhkan dalam pembangunan pendidikan, mengingat pendidikan sangat penting dalam sektor pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan anggaran untuk pendidikan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan kebijakan pendidikan gratis yang diberlakukan pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan adanya kebijakan pendidikan gartis ini maka banyak orang yang akan bisa mengenyam pendidikan tanpa harus memikirkan biaya yang dikeluarkan. Karena setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang memungkinkannya memiliki kesadaran kritis dalam menyikapi dinamika dan

¹ Lihat dalam Guruh Safaat 2008, Jurnal Imiah Niagara, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bandung*. Vol. 1, No. 1, April 2008

fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan itu sangat penting sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus diarahkan secara baik agar bisa menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Kebijakan pendidikan gratis ini bertujuan untuk menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk membantu orang yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan dan untuk peningkatan mutu pendidikan.

Sekitar 75% siswa yang putus sekolah jenjang SMP karena alasan ekonomi. Dari jumlah tersebut, sekitar 65% tak sanggup membiayai pendidikan dan sisanya 10-11% harus mencari pekerjaan. Dalam hemat penulis, jika dianalisa lebih dari setengah akumulatif siswa yang putus sekolah adalah benturan dari masalah ekonomi, ini yang merupakan problematika yang sangat urgen dalam dunia pendidikan saat ini².

Mutu pendidikan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Jika kita berbicara mutu pendidikan artinya kita sedang menepungkan keseluruhan dimensi pendidikan yang satu sama lain saling terkait. Persoalan demi persoalan sistem pendidikan muncul kepercayaan secara tidak beraturan. Misalnya, kesempatan belajar yang kurang merata dan adil, program pendidikan yang belum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, pengelolaan yang belum efisien dan terlalu terpusa, tenaga kependidikan yang belum profesional, biaya yang terbatas, kenakalan remaja dan sebagainya. Persoalan tersebut muncul secara terpisah-pisah dan acak sehingga wajar jika setiap

² Moh. Yahya Obaid 2008. Sekolah Gratis Dalam Perspektif Reformasi Pendidikan. Jurnal Al-Ta'dib. Vol 1. No 1. Hal 22

persoalan tersebut, dianggap seolah-olah sebagai dimensi masalah yang berdiri sendiri-sendiri.

Kebijakan pendidikan gratis yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ini untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan pendidikan, dan juga untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan dan kesejahteraan anak didik serta untuk membantu bagi peserta khususnya orang tua yang kurang mampu agar tidak menjadi suatu beban yang menurut mereka sangat berat, selain itu juga, mereka bisa mengenyam pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Dalam hemat saya, kebijakan pendidikan gratis ataupun penjaminan dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Nasional merupakan suatu terobosan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, mengingat Gorontalo Utara adalah Kabupaten yang masih baru, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang produktif demi pembangunan dan kesejahteraan daerah. Maka dari itu, pendidikan merupakan instrument yang sangat penting untuk masyarakat.

Implikasi dari penggratisan biaya pendidikan yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara kini mulai merambah ke program Provinsi Gorontalo, Untuk Provinsi Gorontalo, Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru terpilih, telah menggagas kebijakan Pendidikan Gratis. Mengingat kebijakan pendidikan gratis merupakan manifestasi dari salah satu program unggulan Provinsi Gorontalo yaitu peningkatan sumber daya manusia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo. kebijakan pendidikan gratis yang nantinya akan digagas oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo pasti akan

membutuhkan anggaran yang cukup besar, karena ada sekitar 5 kabupaten dan 1 Kota yang harus salurkan anggaran, mengingat anggaran yang dikucurkan untuk dialokasikan untuk pendidikan hanya minim.

Pendidikan gratis saat ini sudah menjadi pembicaraan dan problematika di kalangan masyarakat Gorontalo, sehingga, membuat penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis tersebut, agar menjadi sebuah bahan pembelajaran bagi seluruh masyarakat Gorontalo dan lebih khusus untuk para aktivis dan pemerhati pendidikan.

Untuk lebih mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Arifah mengenai Persepsi Masyarakat Makassar Terhadap Realisasi Anggaran Pendidikan Sebagai Landasan Penilaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Dari hasil penelitian ini menjelaskan. Adapun secara realitas, berdasarkan data-data laporan realisasi anggaran dan sejumlah catatan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2007-2011 dalam media cetak dan elektronik menunjukkan uraian upaya pemerintah dalam menjalankan program-program pendidikan melalui gambaran anggaran dan realisasinya. Selain itu, uraian ini dilengkapi pula dengan pendapat masyarakat dalam melihat dan merasakan sendiri sumbangsih pemerintah dalam menjalankan amanah negara terkait pendidikan serta maksimalisasi mutu penyelenggaraan pendidikan melalui realisasi anggaran pendidikan. Pendapat masyarakat terdiri atas pandangan positif

dan pandangan negatif. Dari sudut positif, masyarakat merasakan langsung perubahan besar pasca penerapan pendidikan gratis di sejumlah sekolah. Sedangkan, dari sudut negatif masyarakat menilai masih banyak yang kurang maksimal dari upaya pemerintah, mulai dari kritik terhadap kualitas tenaga pendidik yang masih kurang dan tidak merata, isu liberalisme pada kebijakan-kebijakan yang ada, kecurigaan masyarakat terhadap mengakarnya praktik korupsi di pemerintahan, serta peraturan daerah yang tidak didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai dalam menunjang kreativitas agenda pengembangan anak pada sekolah yang diwajibkan menyelenggarakan pendidikan gratis.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat peneliti simpulkan bahwa persepsi masyarakat Makassar terhadap realisasi anggaran pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah belum maksimal dimana hal tersebut secara kausalitas disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Arafah mengenai Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pemanfaatan dana BOS pada pembelajaran siswa, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah pemanfaatan dana BOS di SD Inpres Tamajene Kota Makassar belum sepenuhnya efektif, karena indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan SD Inpres Tamajene banyak yang belum tercapai sebagai berikut : Pemanfaatan dana bantuan operasional

sekolah yang ditangani oleh di SD Inpres Tamajene Kota Makassar belum sepenuhnya efektif karena pertama aspek SDM, jumlah pegawai/staff yang sedikit khususnya untuk mengelola dana BOS serta minimnya pegawai/staff di lokasi penelitian. Kedua aspek dana, pencairan dana BOS dari pusat sampai ke rekening sekolah terkadang mengalami keterlambatan.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan pendidikan gratis yang layak didapatkan oleh para siswa yang kurang mampu, sejak duduk di bangku pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan sekolah menengah atas. Tetapi, program pendidikan gratis tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Sesuai dengan realita yang ditemukan di lapangan melalui obeservasi awal peneliti dan sempat mewawancarai masyarakat sebagai data awal, ternyata untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya di Kecamatan Sumalata masih ada yang harus dibayar, yaitu, pembayaran fasilitas, seperti, kursi untuk tempat duduk siswa di kelas. Pembayaran fasilitas tersebut mencapai sekitar terjadi di kecamatan sumalata, khususnya di SMA 1 Sumalata, bahwa biaya fasilitas sekolah ternyata masih dibebankan kepada orang tua siswa. Pendidikan gratis yang didengungkan di Gorontalo Utara masih belum terlaksana dengan maksimal dan penelitian tentang pendidikan gratis harus lebih menyentuh ke masyarakat, agar dapat diidentifikasi permasalahan mengenai implementasi kebijakan pendidikan gratis.

Hal ini menjadi suatu masalah yang perlu kita kaji, bahwa pendidikan gratis ini benar-benar harus didapatkan oleh orang-orang yang ekonominya lemah. Karena tujuan dari pendidikan gratis itu sendiri adalah untuk membantu

anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang mempunyai keinginan besar untuk duduk di bangku pendidikan tapi orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan. Yang jadi pertanyaan kemudian, biaya-biaya apa saja yang digratiskan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara?

Dari penjelasan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis di Kecamatan Sumalata.”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalahnya adalah “bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis di Kecamatan Sumalata?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: “Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis di Kecamatan Sumalata”.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yaitu :

- 1.4.1 Bagi peneliti, selain bisa memperdalam wawasan, juga, untuk dapat melatih bagaimana cara untuk menjadi peneliti yang baik, serta lebih memperbanyak pengetahuan tentang pendidikan dalam kehidupan masyarakat.

1.4.2 Bagi pemerintah, hasil penelitian ini akan menjadi bahan rujukan untuk perbaikan sistem dan pendidikan khususnya Kabupaten Gorontalo Utara dan lebih umumnya di Provinsi Gorontalo.